

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2008-2012

ABSTRACT

This study aims to analyze (1) the influence of local revenue of the human development index (2) the effect of the general allocation fund of the human development index (3) the effect of the special allocation fund the human development index districts / cities in Central Java Province period 2008-2012. The population in this study is all the districts / cities in Central Java province. The samples in this study using purposive sampling techniques and data used are secondary data or quantitative. The sample in this study is the 2008-2012 budget report, the local revenue (LR), Data General Allocation Fund (GAF), the data Special Allocation Fund (SAF), and the data is the Human Development Index (HDI) 2008-2012. Technical analysis of the data used is multiple linear regression analysis.

Based on the research results show that (1) the local revenue positive influence on the human development index (2) the general allocation fund has positive influence on the index human development (3) special allocation funds do not affect the human development index.

Keywords: Local Revenue (LR), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), the Human Development Index (HDI)

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2008-2012

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (1) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (2) pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia (3) pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang digunakan adalah data sekunder atau kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan APBD tahun 2008-2012, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Dana Alokasi Umum (DAU), data Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008-2012. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (2) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (3) dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

INTISARI

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi (otonomi daerah) adalah permasalahan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purhcashing power parity index* (ppp) atau indeks daya beli masyarakat.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.